

## **Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya**

**<sup>1</sup>Magdalena Sartika, <sup>2</sup>Indah Murti, <sup>3</sup>Anngaraeny Puspaningtyas**

<sup>1,2&3</sup> Universitas Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

<sup>1</sup>dollysartyka5@gmail.com

<sup>2</sup>endah@untag-sby.ac.id

<sup>3</sup>anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, masih banyak kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Salah satu contoh yang relevan adalah minimnya pemberdayaan UMKM di daerah kelurahan Baratajaya. Pada Perda Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 1 ayat 10 merupakan perancangan yang di buat untuk menyusun rangkaian pemberdayaan UMKM di daerah kota Surabaya. Kelurahan Baratajaya di pilih sebagai salah satu sampling yang menerapkan kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut. Untuk mengukur penerapan evaluasi pemberdayaan tersebut maka di gunakanlah teori Wiliiam Dunn dengan melihat indikator efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Penelitian menggunakan jenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini di peroleh dari Kelurahan Baratajaya menunjukkan bahwa modal yang di berikan pemerintah tidak merata, kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan, tempat pemasaran yang kurang strategis. Kurangnya pemberdayaan UMKM berdampak pada rendahnya produktivitas, rendahnya mutu produk, dan rendahnya daya saing produk UMKM di pasar. Selain itu, UMKM juga seringkali kesulitan dalam memenuhi standar kualitas produk dan tuntutan pasar yang semakin meningkat.

**Kata Kunci: Evaluas; pemberdayaan; UMKM.**

### **Abstract**

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is very important to improve the local economy. However, there are still many obstacles and problems in empowering MSMEs in Indonesia. One relevant example is the lack of MSME empowerment in the Baratajaya sub-district area. In the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 01 of 2021 Concerning Micro Enterprise Empowerment in article 1 paragraph 10 is a design made to compile a series of MSME empowerment in the city of Surabaya. Baratajaya Village was selected as one of the samples that implemented the MSME empowerment policy. To measure the implementation of the empowerment evaluation, William Dunn's theory is used by looking at indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results of this study were obtained from the Baratajaya Village, indicating that the capital provided by the government was uneven, the lack of community response in participating in socialization and training, less strategic marketing locations. The lack of MSME empowerment has an impact on low productivity, low product quality, and low competitiveness of MSME products in the market. In addition, MSMEs also often have difficulty meeting product quality standards and increasing market demands.

**Keywords: Evaluation; empowerment; MSMEs.**

## **PENDAHULUAN**

UMKM berkembang pesat di kota-kota besar, salah satunya di kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan koperasi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UMKM) pada Kota Pahlawan. Terutama bagi usaha kecil yang baru merintis karena usaha kecil masih butuh penguatan dulu dan butuh rekan-rekan sebagai pembina untuk meningkatkan usaha yang baru dibangun. Oleh karena itu melalui koperasi ini menjadi kekuatan bagi usaha mikro dari kecil hingga menengah untuk itu para UMKM diharapkan mengikuti program koperasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya agar pemilik UMKM dapat mengembangkan usaha yang baru dirintis. (Helmi Supriyatno, 2022)

Menurutnya, koperasi di Surabaya telah berperan aktif dalam melatih, memantau dan mendukung para pemangku kepentingan UMKM. Oleh karena itu, usaha kecil dapat menerima hasil sesuai rencana. "Inilah yang dimaksud dengan Koperasi Soko Gulu (Ekonomi Indonesia)," jelasnya. Walikota Eli mengatakan perkembangan koperasi di Surabaya sangat luar biasa. Buktinya,

lompatan pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2021 cukup signifikan di kisaran 8 poin. Bahkan, lonjakan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi negara sebesar 3,69% dan Jawa Timur sebesar 3,57%. "Makanya kita tingkatkan lagi upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita, UMKM kota Surabaya pada tahun ini mencapai lebih dari 60.000, tepatnya 60.007 UMKM.

Dapat dilihat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tersebut secara khusus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 1 ayat 10 sebagai berikut: "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri." Berdasarkan data yang diperoleh melalui data observasi yang dilakukan ditemukan bahwa UMKM yang berada di Kelurahan Bartajaya terdapat sekitar 231 yang aktif sampai sekarang yang dimana UMKM di kelola oleh dinas koperasi kota Surabaya.

UMKM yang berada di Bratang terdiri dari makanan, minuman, kerajinan tangan, toko kelontong, sembako, penjahit dan lain-lain, UMKM yang berada di Kelurahan Baratajaya menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di Baratajaya.

Dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya, Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Menurut Machmuda pelaku usaha UMKM menyatakan “Terutama dalam hal pemasaran Selama ini belum ada pelatihan tersebut. Termasuk soal packaging,” paparnya beberapa pelaku UMKM juga terpaksa berhenti produksi. Sebab mereka tidak mampu memasarkan. Apalagi harga bahan pokok sekarang naik. ” Kami berharap dan ingin sekali bisa mendapatkan pelatihan semacam itu”. (Dipta wahyu,

2022). Dari urain di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Produksi Di Kelurahan Baratajaya Kota Surabaya. Dalam memahami penelitian ini menggunakan teori Menurut (William N. Dunn, 2003) yang menyebutkan bahwa terdapat 6 indikator yaitu: Efektifitas, Efesiens, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas dan ketepatan.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna untuk menganalisis, mendeskripsikan dan memahami masalah yang diteliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, aktifitas dalam bentuk verbal dan linguistik dalam konteks alamiah yang khusus. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Metode ini menggunakan teknik dasar

dari triangulasi Teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan informan menggunakan snowball sampling dengan key informan yaitu lurah dari baratajaya (Yusanto, 2020)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang sebagian besar PDB, UMKM juga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM juga dapat menghasilkan inovasi dan produk yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. UMKM masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal akses ke modal dan teknologi. Banyak UMKM yang masih kesulitan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan oleh karena itu Pemerintah kota surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, seperti menyediakan akses ke sumber daya keuangan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, serta memperbaiki regulasi untuk memudahkan UMKM dalam beroperasi.

Berikut ini definisi kebijakan publik menurut para ahli: Menurut (Dye, 2021) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini termasuk yang ringkas atau tidak kompleks, tetapi banyak mendapat perhatian di kalangan para ahli kebijakan untuk ditelaah, atau kebijakan publik itu harus mencakup bukan saja apa yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, aka tetapi juga apa yang tidak dilakukannya.

### **Definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008.**

#### ***a. Usaha mikro***

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur resmi dalam Undang-undang

#### ***b. Usaha kecil***

Usaha kecil adalah perusahaan komersial yang mandiri dan produktif. Segala sesuatu yang dilakukan oleh perseorangan atau badan pengusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang

**c. Usaha menengah**

Usaha menengah adalah bagian dari usaha kecil atau menengah besar yang dioperasikan, secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan, atau memiliki jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu adalah usaha ekonomi yang mandiri dan produktif. , diatur dengan undang-undang ini. Berdasarkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Republik Indonesia.

Kriteria usaha mikro dapat di lihat dari penghasilan. Penghasilan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan untuk keperluan usaha paling banyak Rp50.000.000,00 (50 juta Rupiah). Kemudian omzet tahunan sampai dengan Rp300.000.000,00 (300 juta Rupiah). Sementara untuk kriteria usaha kecil memiliki penghasilan jualan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (50 juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (500 juta Rupiah), serta memperoleh keuntungan tahunan

mulai dari Rp300.000.000,00 (300 juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (2,05 miliar rupiah).

Untuk kriteria usaha menengah memiliki penghasilan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (500 juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (10 miliar Rupiah). Dengan pendapatan bersih tahunan dari penjualan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Rp 2,05 miliar) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (Rp 50 miliar).

Menurut (William N. Dunn, 2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

**1. Efektivitas (*Effectiveness*)**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya. Untuk

melihat itu peneliti melakukan mewawancarai pegawai kelurahan untuk mendapatkan data terkait keberhasilan program pemberdayaan UMKM yang diterapkan oleh kelurahan baratajaya.



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator efektivitas pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan Sudah berjalan secara optimal dalam pemberdayaanya di lihat dari banyaknya antusias warga yang mengikuti program UMKM akan tetapi ada beberapa pelaku UMKM belum bisa bangkit di karenakan dampak pandemi sampai saat ini serta lokasi penjualanya kurang strategis

## **2. Efisiensi (*Efficiency*)**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Efisiensi (*eficiency*) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan

antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi, efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara terkait upaya dalam pengembangan pelatihan untuk meningkatkan UMKM.

Tabel 1.1. Daftar UMKM Kelurahan Baratajaya

No	Bidang	Jumlah
1	Toko Sembako	57
2	Kuliner	107
3	Laundry	2
4	Warkop	25
5	Bengkel	12
6	Foto copy	8
7	Penjahit	16
8	Jasa Kurir	2
9	Salon	2
Jumlah :		231

Sumber: BPUM Baratajaya 2022

Menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator efisiensi pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan modal yang di berikan pemerintah untuk usaha pelaku UMKM belum ada hanya orang-orang tertentu yang mendapatkanya akan tetapi pihak pemerintah yaitu kelurahan mengusahakan membuat Nomor induk bersuha NIB dan membantu menyediakan gerobak

### 3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Kecukupan (*adequacy*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Berdasarkan pengertian kecukupan di atas adalah seberapa jauh tingkat efektifitas suatu kebijakan yang dibuat oleh birokrat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau peluang dari nilai yang bersangkutan karenanya peneliti ingin mengetahui keterlibatan pemerintah dalam pemberian modal dalam pengembangan usaha masyarakat.



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator efisiensi pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan pelaku UMKM kurang tertarik ikut program pelatihan di karenakan

tidak di berikan modal oleh pemerintah akan tetapi pemerintah sendiri sudah membuat program pelatihan pemberdayaan UMKM.

### 4. Pemerataan (*Equity*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Pemerataan (*equity*) yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Sebagai temuan peneliti ingin mengetahui modal yang diberikan oleh pemerintah merata ke semua pelaksana UMKM di daerah kelurahan baratajaya.



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator Pemerataan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan optimal di karenakan modal yang I berikan belum

rata kepada pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya akan tetapi pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi masyarakat terkadang tidak mau mengikuti.

#### **5. Responsivitas (*Responsiveness*)**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Responsivitas (*responsiveness*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok kelompok dalam masyarakat tertentu seberapa baik kebijakan memecahkan masalah. Preferensi atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda, dan mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator responsivitas pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan sudah berjalan optimal di karenakan pemerintah sudah membuat program-program sosialisasi, pelatihan akan tetapi terkadang masyarakat malah tidak mengikutinya.

#### **6. Ketepatan (*Appropriateness*)**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah ketepatan (*appropriateness*) Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui hambatan dan kendala dalam jalannya pengembangan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator ketepatan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan modal yang ada belum cukup untuk mengembangkan usaha UMKM Kelurahan Baratajaya, masyarakat membutuhkan suntikan modal dari pemerintah.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang di temukan menggunakan teori Evaluasi dari William Dunn (2003) yang menyebutkan bahwa efisiensi, efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang di terapkan menunjukkan bahwa Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan



Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menunjukkan bahwa masih belum optimal dalam hal pemberdayaan. Seperti modal yang di berikan pemerintah tidak merata, kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan, tempat pemasaran yang kurang strategis. Dengan berkurangnya pemberdayaan UMKM, UMKM akan sulit berkembang dan bersaing di pasar. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memperkuat kemandirian UMKM melalui program pelatihan, pendanaan, dan akses ke teknologi informasi. Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing pasar.

#### REFENSI

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>

rief Budiyanto. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam

Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan. 4(1), 80–93.

Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 7(1), 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>